



## WALIKOTA TASIKMALAYA

### KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 40 Tahun 2004

LAMPIRAN : -

### TENTANG

### PENYEDIAAN LAHAN UNTUK TEMPAT PEMAKAMAN UMUM OLEH PERUSAHAAN PEMBANGUN PERUMAHAN DI KOTA TASIKMALAYA

## WALIKOTA TASIKMALAYA

- Yang :
- bahwa Tempat Pemakaman Umum merupakan fasilitas sosial yang harus disiapkan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat;
  - bahwa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987 Tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan kepada Pemerintah Daerah, Tempat Pemakaman Umum, termasuk fasilitas sosial, sehingga merupakan salah satu kewajiban bagi Para Pengembang baik Perumnas atau Perusahaan Pembangun Perumahan lainnya untuk menyediakan dan penyerahan lahan Tempat Pemakaman Umum kepada Pemerintah Daerah;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, untuk pengaturannya perlu ditetapkan dalam Keputusan Walikota Tasikmalaya.
- Dit :
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
  - Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan Pemukiman;
  - Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
  - Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan kepada Pemerintah Daerah;
  - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman;
  - Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/KPTS/1986 tentang Pedoman Teknik Pembangunan Perumahan Sederhana Tidak Bersusun;
  - Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 39 Tahun 1996 tentang Penyediaan Lahan untuk Tempat Pemakaman Umum oleh Perusahaan Pembangunan Perumahan;

- Tasikmalaya;
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2004 tentang Fatwa Pengarahan Lokasi;
  13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya.
  14. Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 2003 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Lingkungan Hidup dan Pelayanan Kebersihan Kota Tasikmalaya;

## MEMUTUSKAN

### KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA TENTANG PENYEDIAAN LAHAN UNTUK TEMPAT PEMAKAMAN UMUM OLEH PERUSAHAAN PEMBANGUN PERUMAHAN DI KOTA TASIKMALAYA

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Tempat Pemakaman Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk menguburkan jenazah bagi warga penghuni perumahan;
- d. Perusahaan adalah Perumnas dan Perusahaan yang bergerak di bidang Pembangunan Perumahan;
- e. Lahan Siap Bangun adalah tanah yang siap pakai yang dilengkapi dengan prasarana lingkungan;
- f. Fatwa Pengarahan Lokasi adalah fatwa bagi pengarahannya lokasi dan peruntukan lahan yang didasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai rencana yang mengikat dalam pelayanan umum;
- g. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya yang selanjutnya disingkat RTRW Kota Tasikmalaya adalah rencana tata ruang yang mengatur struktur dan pola tata ruang wilayah kota.

#### BAB II TATA CARA PENYEDIAAN LAHAN UNTUK TEMPAT PEMAKAMAN UMUM Pasal 2

- (1) Setiap Perusahaan Pembangun Perumahan yang memperoleh fatwa pengarahannya lokasi dari Pemerintah Kota Tasikmalaya, diwajibkan untuk menyediakan lahan untuk Tempat Pemakaman Umum;
- (2) Penyediaan lahan untuk Tempat Pemakaman Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, ditetapkan sebesar 2% (dua persen) dari lahan yang telah dibebaskan.

Penetapan lokasi Tempat Pemakaman Umum harus berpedoman kepada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya yang pengaturannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 4

Bagi Perusahaan yang kesulitan dalam menyediakan lahan untuk keperluan Tempat Pemakaman Umum dapat meminta pengarahannya atau bantuan kepada Pemerintah Daerah untuk menunjukan dan atau menyiapkan lokasi, dengan biaya sepenuhnya dibebankan kepada Perusahaan yang bersangkutan;

Pasal 5

- (1) Penyerahan lahan untuk keperluan Tempat Pemakaman Umum kepada Pemerintah Daerah, dilaksanakan pada waktu mengajukan Site Plan;
- (2) Lahan Tempat Pemakaman Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, harus dalam bentuk kapling siap bangun dengan dilengkapi jalan masuk dan saluran pembuangan air hujan.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penetapannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di : Tasikmalaya  
Pada tanggal : 22 Juli 2004



17  
Undangkan di : Tasikmalaya  
Tanggal : 23-7-2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

DANG SUI DARMA S.  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 480 091 785

Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya  
Tahun 2004 Nomor : 57 Seri E

Lampiran I : Keputusan Walikota Tasikmalaya  
Nomor : 40 Tahun 2004  
Tahun : 21 Juli 2004

FORM A

Tasikmalaya , ..... 200 ..

Nomor : Kepada Yth.  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan Izin Lokasi. Walikota Tasikmalaya  
Melalui :  
Kepala Kantor Pertanahan  
di –  
TASIKMALAYA

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kami .....  
alamat ..... dengan ini mengajukan permohonan izin lokasi untuk  
keperluan ....., dengan keterangan sebagai berikut :

I. KETERANGAN TENTANG PEMOHON

1. Nama / Badan Usaha :
2. Alamat :
3. Akta Pendirian :
4. NPWP :

II. KETERANGAN TENTANG TANAHNYA

1. Luas : ± M<sup>2</sup>
2. Letak Tanah
  - a. Desa/Kelurahan :
  - b. Kecamatan :
  - c. K o t a : Tasikmalaya
  - d. Propinsi : Jawa Barat
3. Status Tanah :
4. Penggunaan Tanah Saat Kini :
5. Rencana Penggunaan Tanah :

Untuk melengkapi permohonan ini Kami lampirkan :

- a. Foto Copy KTP ;
- b. Akta Pendirian Perusahaan / Surat Izin Usaha ;
- c. Surat Keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak ;
- d. Gambar kasar/sketsa tanah yang dimohon ;
- e. Pernyataan kesanggupan untuk memberikan ganti rugi dan atau menyediakan tempat penampungan bagi pemilik tanah ;
- f. Uraian rencana proyek yang akan dibangun (draft site plan) ;
- g. Surat Persetujuan Presiden (untuk PMA) atau Surat Persetujuan Menteri Negara Investasi /Ketua BKPM (untuk PMDN) atau Surat Persetujuan Prinsip dari Instansi Teknis (untuk non PMA/PMDN) ;
- h. Surat Keterangan terdaftar sebagai anggota REI bagi perusahaan pembangunan perumahan ;
- i. Surat Pernyataan mengenai luas tanah yang sudah dikuasai / dimiliki oleh perusahaan pemohon dan perusahaan-perusahaan lain yang merupakan satu group ;
- j. Uraian status kepemilikan tanah / riwayat tanah ;
- k. Surat Keterangan lainnya yang dipandang perlu ;

Atas perhatiannya, disampaikan terima kasih.

Hormat Kami  
Pemohon,

( ..... )

- Tembusan Kepada Yth :
1. Asisten Tata Praja Setda Kota Tasikmalaya ;
  2. Kepala Bapeda Kota Tasikmalaya .

WALIKOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN

FORM B

**TANDA TERIMA  
 BERKAS PERMOHONAN IZIN LOKASI**

Telah terima berkas permohonan Izin Lokasi dari :

5. Nama Pemohon :  
 6. Nama Perusahaan :  
 7. Alamat :  
 4. Letak Tanah yang dimohon  
 e. Desa/Kelurahan :  
 f. Kecamatan :  
 g. Kota : Tasikmalaya  
 h. Propinsi : Jawa Barat  
 5. Rencana Penggunaan Tanah :  
 6. Luas : ± M<sup>2</sup>

Dengan kelengkapan berkas sebagai berikut :

No	Jenis Kelengkapan	Ada ( V ) Tidak Ada ( - )	Keterangan
1	Foto Copy KTP .	.....	
2	Akta Pendirian Perusahaan / Surat Izin Usaha .	.....	
3	Surat Keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak .	.....	
4	Gambar kasar/sketsa tanah yang dimohon .	.....	
5	Pernyataan kesanggupan untuk memberikan ganti rugi dan atau menyediakan tempat penampungan bagi pemilik tanah .	.....	
6	Uraian rencana proyek yang akan dibangun (draf site plan) .	.....	
7	Surat Persetujuan Presiden (untuk PMA) atau Surat Persetujuan Menteri Negara Investasi /Ketua BKPM (untuk PMDN) atau Surat Persetujuan Prinsip dari Instansi Teknis (untuk non PMA/PMDN) .	.....	
8	Surat Keterangan terdaftar sebagai anggota REI bagi perusahaan pembangunan perumahan .	.....	
9	Arahan RTRW / RDTR dari Instansi teknis .	.....	
10	Surat Pernyataan mengenai luas tanah yang sudah dikuasai / dimiliki oleh perusahaan pemohon dan perusahaan-perusahaan lain yang merupakan satu group.	.....	
11	Uraian status kepemilikan tanah / riwayat tanah .	.....	
12	Surat Keterangan lainnya yang dipandang perlu : .....	.....	

Tasikmalaya, ..... 200 .....  
 An. KEPALA KANTOR PERTANAHAN  
 KOTA TASIKMALAYA  
 Kepala Seksi Penatagunaan Tanah,

( ..... )

WALIKOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN

FORM C

---

Tasikmalaya, ..... 200 ..

Nomor :  
Lampiran : Kepada  
Perihal : Kelengkapan Berkas Permohonan.  
Yth. ....

di –  
.....

Menunjuk surat Saudara Tanggal ..... Nomor ..... perihal permohonan Izin Lokasi untuk keperluan ..... seluas ± ..... M<sup>2</sup>, terletak di Desa/ Kelurahan ..... Kecamatan ..... Kota Tasikmalaya, setelah diteliti ternyata masih ada kekurangan berkas sebagai berikut :

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

dan masih diperlukan perbaikan dalam hal :

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

Demikian untuk menjadi maklum.

An. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TASIKMALAYA.  
Kepala Seksi Penatagunaan Tanah

( ..... )

WALIKOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN

FORM D

---

Tasikmalaya, ..... 200 ..

Nomor : Kepada Yth.  
Lampiran :  
Perihal : Undangan Rapat Koordinasi.

1. Sdr. Asisten Tata Praja
2. Sdr. Kepala Bagian Hukum
3. Sdr. Kepala Bapeda
4. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
5. Sdr. Camat .....
6. Sdr. Lurah/Kepala Desa .....
7. Sdr. ....

di –

TASIKMALAYA

Bersama ini Kami mengundang Sudara untuk menghadiri Rapat Koordinasi pembahasan permohonan Izin Lokasi, atas nama .....  
alamat ..... , terletak di Desa / Kelurahan .....  
Kecamatan ..... Kota Tasikmalaya, pada :

H a r i : .....

Tanggal : .....

J a m : .....

Tempat : .....

Atas perhatiannya, Kami ucapkan terima kasih.

An. WALIKOTA TASIKMALAYA.  
Kepala Kantor Pertanahan,

( ..... )

Tembusan disampaikan kepada Yth :  
1. Walikota Tasikmalaya (sebagai laporan)

W WALIKOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN

FORM E

---

BERITA ACARA  
RAPAT KOORDINASI DALAM RANGKA PEMBERIAN IZIN LOKASI  
UNTUK KEPERLUAN ..... ATAS NAMA .....  
SELUAS ± ..... M<sup>2</sup>, TERLETAK DI DESA/KELURAHAN .....  
KECAMATAN ..... KOTA TASIKMALAYA

Nomor :  
Tanggal :  
Tahun :

---

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... (*diisi waktu dalam angka*) telah dilaksanakan rapat koordinasi dalam rangka membahas permohonan Izin Lokasi berdasarkan Surat Undangan Nomor ..... Tanggal ..... bertempat di ..... , dengan ini mengambil kesimpulan bahwa terhadap permohonan :

- a. Nama :  
Pekerjaan :  
Alamat :
- b. Bertindak untuk dan  
atas nama :  
Alamat :  
N P W P :
- c. Letak tanah yang dimohon  
Kampung/Blok/Jalan :  
Desa/Kelurahan :  
Kecamatan :  
K o t a : Tasikmalaya  
Nomor Grid :
- d. Peruntukan tanah :

Dari tanah yang dimohon seluas ± ..... M<sup>2</sup>, diberikan pertimbangan sebagai berikut :

Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah :

.....  
.....

Tumpang Tindih Peruntukan :

.....  
.....

Kepastian Lokasi dan Luas yang dapat diberikan :

.....  
.....

Kepentingan Pihak Ketiga yang ada di lokasi yang dimohon :



.....  
.....  
Kesimpulan :

Pada prinsipnya permohonan Izin Lokasi atas nama ..... yang beralamat di ..... untuk tanah seluas ± ..... M<sup>2</sup> terletak di Desa/Kelurahan ..... Kecamatan ..... Kota Tasikmalaya dapat / tidak dapat \*) direkomendasikan dengan syarat dan ketentuan / alasan \*) sebagai berikut :

1. ....
2. ....
3. .... dst.

Demikian Berita Acara Rapat Koordinasi Izin Lokasi atas nama ..... ini dibuat dan ditandatangani bersama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

- |  |          |
|--|----------|
| 1. Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya                                      | 1 .....  |
| 2. Kepala Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya                               | 2 .....  |
| 3. Assisten Tata Praja Setda Kota Tasikmalaya                              | 3 .....  |
| 4. Kepala Bappeda Kota Tasikmalaya / yang mewakili                         | 4 .....  |
| 5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tasikmalaya / yang mewakili            | 5 .....  |
| 6. Kepala Bagian Hukum pada Setda Kota Tasikmalaya / yang mewakili         | 6 .....  |
| 7. Kepala Seksi Penatagunaan Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya | 7 .....  |
| 8. Camat ..... / yang mewakili   | 8 .....  |
| 9. Kepala Desa / Lurah ..... / yang mewakili                               | 9 .....  |
| 10. Kepala Dinas, Kantor atau Badan Instansi terkait / yang mewakili       | 10 ..... |

\*) pilih sesuai hasil keputusan rapat

WALIKOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN

FORM F

---

KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA  
NOMOR :

TENTANG

PEMBERIAN IZIN LOKASI  
UNTUK KEPERLUAN ..... ATAS NAMA.....  
SELUAS ± .....M<sup>2</sup> TERLETAK DI DESA/KELURAHAN .....  
KECAMATAN ..... KOTA TASIKMALAYA

---

---

WALIKOTA TASIKMALAYA

- Membaca : 1. Surat permohonan Nomor ..... Tanggal ..... dari ..... alamat ..... perihal Permohonan Izin Lokasi , yang diterima secara lengkap pada tanggal ..... ;
2. Akta Pendirian ..... Nomor ..... Tanggal ..... yang dibuat dihadapan Notaris ..... di ..... ;
3. Uraian Rencana Proyek yang akan dibangun yang disusun oleh Pemohon ;
- Memperhatikan : Berita Acara Rapat Koordinasi dalam rangka pemberian Izin Lokasi Nomor ..... Tanggal ..... ,
- Menimbang : 1. bahwa lokasi tanah yang dimohon berdasarkan Peraturan Daerah Nomor ..... Tahun ..... tentang ..... diperuntukkan ..... dengan demikian dimungkinkan untuk ..... ;
2. bahwa berdasarkan Pertimbangan Aspek Tata Guna Tanah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya Nomor ..... Tanggal ..... ;
3. bahwa areal yang dimohon dilihat dari Rencana Pembangunannya sudah cukup memadai dan tidak tumpang tindih dengan peruntukan lain;
4. bahwa pihak ketiga yang berkepentingan dengan areal yang dimohon tidak ada kecuali pemilik tanah yang bersedia melepaskan hak atas tanahnya kepada ..... , sesuai ketentuan yang berlaku ;
5. bahwa ..... ( *diisi dengan pertimbangan-pertimbangan yang diperlukan* ) ;
6. bahwa atas dasar pertimbangan pada butir ..... sampai dengan ..... diatas, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan syarat-syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam Keputusan ini ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992, tentang Penataan Ruang ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993, tentang Tata Cara Penanaman Modal ;
5. Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 1994, tentang Tata Cara Memperoleh Tanah Bagi Perusahaan, Dalam Rangka Penanaman Modal ;

6. Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 1997 jo. Nomor Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pemberian Hak Milik atas tanah untuk Rumah Sederhana (RS) dan Rumah Sangat Sederhana (RSS) (*diisi untuk kegiatan pembangunan perumahan RS dan RSS*);
7. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999, tentang Izin Lokasi ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberikan Izin Lokasi kepada .....beralamat di ..... untuk keperluan ..... seluas ± ..... M<sup>2</sup>, terletak di Desa / Kelurahan ..... Kecamatan ..... Kota Tasikmalaya, sebagaimana tercantum dalam Peta Lokasi Tanah pada Lampiran Keputusan ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :
1. Perolehan tanah harus dilakukan secara langsung antara pihak-pihak yang berkepentingan melalui pelepasan hak dengan memberikan ganti kerugian yang bentuk dan besarnya ditentukan secara musyawarah ;
  2. Pembayaran ganti kerugian tanah serta tanaman dan atau bangunan yang ada di atasnya ataupun barang-barang lain milik pemegang hak atas tanah tidak dibenarkan dilaksanakan melalui perantara dalam bentuk apapun juga melainkan harus dibayarkan langsung kepada yang berhak atau kuasanya yang sah menurut hukum ;
  3. Untuk tanah yang sudah diperoleh penerima Izin Lokasi diwajibkan mengajukan permohonan hak atas tanah kepada pejabat yang berwenang melalui Kepala Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya, sebagaimana diatur dalam ..... ;
  4. (*Persyaratan-persyaratan lain yang dianggap perlu*)
    - a. ....
    - b. ....
    - c. .... Dst
- KEDUA : Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan pada diktum PERTAMA Keputusan ini dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan dan hasilnya dilaporkan kepada Walikota Tasikmalaya.
- KETIGA : Pemegang izin lokasi berkewajiban untuk melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Walikota Tasikmalaya melalui Kepala Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan izin lokasi dan pelaksanaan penggunaan tanahnya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk jangka waktu ..... (*huruf*) bulan sejak tanggal ditetapkan dan apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sebelum masa berakhirnya Keputusan ini tidak mengajukan permohonan perpanjangan dan atau perpanjangannya ditolak, maka Keputusan ini batal demi hukum tanpa harus meminta persetujuan lebih dahulu dari penerima Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

*Ditetapkan di Tasikmalaya*

pada tanggal

**WALIKOTA TASIKMALAYA,**

.....

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya;
2. Asisten Tata Praja Setda Kota Tasikmalaya;
3. Kepala Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya.

**WALIKOTA TASIKMALAYA**

Ttd.

**H. BUBUN BUNYAMIN**

FORM G

---

Tasikmalaya, ..... 200 ..

Nomor : ..... Kepada  
Lampiran : .....  
Perihal : Penolakan Izin Lokasi. Yth. ....

.....

di –

.....

Menunjuk surat permohonan Izin Lokasi Tanggal ..... Nomor .....  
atas nama ..... alamat ..... , terletak di  
Desa/ Kelurahan ..... Kecamatan ..... Kota Tasikmalaya.

Setelah diadakan penelitian, maka permohonan Saudara *tidak dapat* dipertimbangkan  
dengan alasan :

.....  
.....  
.....

Demikian untuk menjadi maklum.

An. WALIKOTA TASIKMALAYA.  
Kepala Kantor Pertanahan,

( ..... )

Tembusan disampaikan kepada Yth :  
2. Bapak Walikota Tasikmalaya;  
3. Kepala Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya;  
4. Kepala Bapeda Kota Tasikmalaya.

WALIKOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN

Lampiran VIII : Keputusan Walikota Tasikmalaya

Nomor : 40 Tahun 2004

Tahun : 21 Juli 2004

FORM H

Tasikmalaya, ..... 200 ..

Nomor : Kepada Yth.  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Kepala Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya  
Lokasi. di –

TASIKMALAYA

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kami .....  
alamat ..... dengan ini mengajukan permohonan perpanjangan  
Izin Lokasi, dengan keterangan sebagai berikut :

III. KETERANGAN TENTANG PEMOHON

8. Nama :  
Bertindak untuk  
atas nama :  
9. Alamat :  
10. Akta Pendirian :  
11. NPWP :

IV. KETERANGAN TENTANG TANAHNYA

1. Nomor SK. Izin Lokasi :  
2. Tanggal SK. Izin Lokasi :  
3. Letak Tanah  
i. Desa/Kelurahan :  
j. Kecamatan :  
k. Kota : Tasikmalaya  
l. Propinsi : Jawa Barat  
4. Peruntukan Tanah :  
5. Luas Tanah : M<sup>2</sup>  
6. Luas Tanah yang telah diperoleh/dimanfaatkan : M<sup>2</sup>

Untuk melengkapi permohonan ini Kami lampirkan :

- l. Perolehan dan atau pemanfaatan tanah ;  
m. Hasil monitoring perolehan dan pemanfaatan tanah ;  
Atas perhatiannya, disampaikan terima kasih.

Hormat Kami  
Pemohon,

( ..... )

- Tembusan Kepada Yth :  
1. Walikota Tasikmalaya;  
2. Setda Kota Tasikmalaya;  
3. Asisten Tata Praja Setda Kota Tasikmalaya;  
4. Kepala Bapeda Kota Tasikmalaya.

WALIKOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN

Lampiran IX : Keputusan Walikota Tasikmalaya

Nomor : 40 Tahun 2004

Tahun : 21 Juli 2004

FORM I

---

KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA  
NOMOR :

TENTANG

PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN LOKASI  
UNTUK KEPERLUAN ..... ATAS NAMA.....  
SELUAS ± ..... M<sup>2</sup> TERLETAK DI DESA/KELURAHAN .....  
KECAMATAN ..... KOTA TASIKMALAYA

---

---

WALIKOTA TASIKMALAYA

- Membaca : 4. Surat permohonan Nomor ..... Tanggal ..... dari ..... alamat ..... perihal Permohonan Perpanjangan Izin Lokasi ;
5. Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor ..... Tanggal ..... tentang Pemberian Izin Lokasi atas nama ..... ;
- Memperhatikan : Hasil laporan perolehan dan pemanfaatan tanah dari ..... dan monitoring perolehan dan pemanfaatan tanah dari Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya ;
- Menimbang : bahwa dari luas tanah yang dimohon seluas ± ..... M<sup>2</sup> telah dibebaskan dan atau dimanfaatkan seluas ± ..... M<sup>2</sup> ( ... % ) ;
- Mengingat : 8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;
9. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992, tentang Penataan Ruang ;
10. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah ;
11. Keputusan Presiden RI Nomor 97 Tahun 1993, tentang Tata Cara Penanaman Modal ;
12. Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 1994, tentang Tata Cara Memperoleh Tanah Bagi Perusahaan, Dalam Rangka Penanaman Modal ;
13. Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 1997 jo. Nomor Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pemberian Hak Milik atas tanah untuk Rumah Sederhana (RS) dan Rumah Sangat Sederhana (RSS) (*diisi untuk kegiatan pembangunan perumahan RS dan RSS*) ;
14. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999, tentang Izin Lokasi ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberikan perpanjangan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor ..... Tanggal ..... kepada .....
- KEDUA : Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan apabila telah berakhir izin perpanjangan namun pemohon tidak mampu membebaskan tanah yang tersisa, maka izin yang diperolehnya sama dengan luas tanah yang sudah dibebaskan.
- KETIGA : Keputusan ini tidak dapat diperpanjang lagi untuk kedua kalinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

*Ditetapkan di Tasikmalaya*

pada tanggal

**WALIKOTA TASIKMALAYA,**

.....

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

4. Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya;
5. Asisten Tata Praja Setda Kota Tasikmalaya;
6. Kepala Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya.

WALIKOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN



FORM J

Tasikmalaya , ..... 200 ..

Nomor : Kepada Yth.  
Lampiran :  
Perihal : Pemberitahuan Rencana Perolehan dan atau Penggunaan Tanah. Kepala Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya  
Melalui :  
Kepala Seksi Penatagunaan Tanah  
di –  
TASIKMALAYA

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kami .....  
alamat ..... dengan ini memberitahukan rencana perolehan dan  
atau pgunaan tanah untuk permohonan Surat Keterangan Izin Lokasi, dengan keterangan  
sebagai berikut :

I. KETERANGAN TENTANG PEMOHON

1. Nama / Badan Usaaha :
2. Alamat :
3. Akta Pendirian :
4. NPWP :

II. KETERANGAN TENTANG TANAHNYA

1. Luas : M<sup>2</sup>
2. Letak Tanah
- a. Desa/Kelurahan :
- b. Kecamatan :
- c. K o t a : Tasikmalaya
- d. Propinsi : Jawa Barat
3. Status Tanah :
6. Penggunaan Tanah Saat Kini :
7. Rencana Penggunaan Tanah :

Untuk melengkapi permohonan ini Kami lampirkan :

- a. Foto Copy KTP ;
  - b. Akta Pendirian Perusahaan / Surat Izin Usaha ;
  - c. Surat Keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak ;
  - d. Gambar kasar/sketsa tanah yang dimohon ;
  - e. Pernyataan kesanggupan untuk memberikan ganti rugi dan atau menyediakan tempat penampungan bagi pemilik tanah ;
  - f. Uraian rencana proyek yang akan dibangun (draf site plan) ;
  - g. Surat Persetujuan Presiden (untuk PMA) atau Surat Persetujuan Menteri Negara Investasi /Ketua BKPM (untuk PMDN) atau Surat Persetujuan Prinsip dari Instansi Teknis (untuk non PMA/PMDN) ;
  - h. Surat Keterangan terdaftar sebagai anggota REI bagi perusahaan pembangunan perumahan ;
  - i. Surat Pernyataan mengenai luas tanah yang sudah dikuasai / dimiliki oleh perusahaan pemohon dan perusahaan-perusahaan lain yang merupakan satu group ;
  - j. Uraian status kepemilikan tanah / riwayat tanah ;
  - k. Surat Keterangan lainnya yang dipandang perlu ;
- Atas perhatiannya, disampaikan terima kasih.

Hormat Kami  
Pemohon,

( ..... )

Tembusan Kepada Yth :  
5. Kepala Bapeda Kota Tasikmalaya.

W WALIKOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN

FORM K.1

---

## **SURAT KETERANGAN**

Nomor : .....  
Lampiran : Peta Lokasi Tanah

Sehubungan dengan pemberitahuan dari perusahaan Badan Hukum / Perorangan :

Nama :

Alamat :

untuk melaksanakan kegiatan perolehan dan penggunaan tanah / penggunaan tanah \*) guna keperluan  
..... seluas ± ..... M<sup>2</sup>, yang terletak di :

Desa / Kelurahan :

Kecamatan :

K o t a : Tasikmalaya

dengan mempertimbangkan :

1. Data-data perusahaan yang bersangkutan.
2. Hasil Penelitian Aspek Tata Guna Tanah Nomor ..... Tanggal .....
3. Data perolehan dan rencana penggunaan tanah / Rencana perolehan dan penggunaan tanah \*).
4. Keterangan lain yang mendukung rencana kegiatan.

maka dapat diberikan keterangan bahwa Badan Hukum / Perorangan ..... **dapat**  
melaksanakan rencana perolehan dan penggunaan tanah / rencana penggunaan tanah \*) untuk selanjutnya  
dapat mengajukan permohonan hak atas tanahnya sesuai dengan peruntukannya.

Tasikmalaya, ..... 200 .....

KEPALA KANTOR PERTANAHAN  
KOTA TASIKMALAYA

( ..... )  
NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth :  
1 Walikota Tasikmalaya;  
2. Kepala Bapeda Kota Tasikmalaya.

WALIKOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN

FORM K.2

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : .....

Sehubungan dengan pemberitahuan dari perusahaan Badan Hukum / Perorangan :

Nama :

Alamat :

untuk melaksanakan kegiatan perolehan dan penggunaan tanah / penggunaan tanah \*) guna keperluan  
..... seluas ± ..... M<sup>2</sup>, yang terletak di :

Desa / Kelurahan :

Kecamatan :

K o t a : Tasikmalaya

dengan mempertimbangkan :

5. Data-data perusahaan yang bersangkutan.

6. Hasil Penelitian Aspek Tata Guna Tanah Nomor ..... Tanggal .....

7. Data perolehan dan rencana penggunaan tanah / Rencana perolehan dan penggunaan tanah \*).

8. Peraturan-peraturan dan keterangan lain dari instansi terkait.

maka dapat diberikan keterangan bahwa Badan Hukum / Perorangan ..... **tidak dapat**  
melaksanakan rencana perolehan dan penggunaan tanah / rencana penggunaan tanah \*) dimaksud karena  
tidak sesuai dengan :

a. ....

b. ....

c. ....

Tasikmalaya, ..... 200 .....

KEPALA KANTOR PERTANAHAN  
KOTA TASIKMALAYA

( ..... )  
NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Tasikmalaya;
2. Kepala Bapeda Kota Tasikmalaya.

WALIKOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN